



Strategi Kaur Perencanaan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Di Pemerintahan Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban

Kastini¹, Nina Oktarina²

^{1,2}Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i2.21692

Sejarah Artikel

Diterima: 24 Februari 2025
Disetujui: 17 Juni 2025
Dipublikasikan: 27 Agustus 2025

Keywords:

Tax aggressiveness, political connection, capital intensity, and leverage

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang peran Kaur Perencanaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima di Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain naratif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Kaur Perencanaan memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun rencana pembangunan dan mengelola data desa, namun sering kali dihadapkan pada tugas tambahan yang mengganggu fokus pada tugas utamanya. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan meliputi pengembangan kompetensi teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi dengan perangkat desa lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan staf, pelatihan teknologi, dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik di tingkat desa.

Abstract

This research examines about the role of the Head of Planning in improving the quality of service excellence in Sogo Village, Kedungtuban Sub-district, Blora District. Using a qualitative approach and narrative design, data was collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that the Kaur Perencanaan has the main responsibility in preparing development plans and managing village data, but is often faced with additional tasks that interfere with the focus on his main duties. Strategies implemented to improve services include developing information technology competencies, increasing human resource capacity, collaborating with other village officials, and increasing transparency and accountability. However, constraints such as limited resources and resistance to change remain a challenge. This study recommends additional staff, technology training, and the development of standard operating procedures (SOPs) to improve service effectiveness. The results of this study are expected to provide insights for the development of public service policies at the village level.

PENDAHULUAN

Desa Sogo terletak di Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora yang memiliki luas wilayah sekitar 469, 31 hektar dan dihuni oleh 3.509 jiwa. Desa ini memiliki posisi yang strategis, yaitu berdekatan dengan Blok Cepu yang berpotensi mendorong perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Potensi yang dimiliki Desa Sogo yaitu meliputi lahan yang luas yang memungkinkan pengembangan di bidang pertanian, peternakan, wisata lokal, serta pembangunan fasilitas perekonomian yang mudah dijangkau, seperti pasar, toko, dan koperasi (Magfirona et al., 2024). Untuk pemerintahan desa yang berjalan dipimpin oleh kepala desa yang memerlukan dukungan dari perangkat desa, termasuk kepala urusan perencanaan atau Kaur Perencanaan yang memiliki tugas penting dalam menyusun rencana anggaran dan laporan pembangunan. Putri et al. (2023) dalam penelitiannya menjelaskan perangkat desa berperan penting dalam pemerintah desa dengan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas, memastikan kelancaran pemerintahan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiawati & Tri Aji (2020) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, hubungan ini tidak terlepas dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar menunjukkan suatu tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Namun dalam kenyataannya, Kaur Perencanaan di Desa Sogo sering mendapatkan tugas di luar kewajibannya, seperti pelayanan publik dan administrasi. Hal ini disebabkan oleh kekosongan jabatan di Kasi Pelayanan dan kurangnya penguasaan teknologi di kalangan perangkat desa lainnya. Sehingga dapat berpotensi mengganggu kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidyanto et al. (2021) yang menyatakan bahwa masih banyak kekosongan jabatan dan masih ditemukannya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Pelayanan prima di pemerintahan desa layanan publik harus diproses sesuai tahapan, prosedur, dan transparan untuk mencapai kepuasan sesuai visi organisasi (Ediwijoyo, et al., 2023). Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan keputusan (Setiawati & Tri Aji, 2020). Pelayanan prima merupakan standar kualitas dalam pelayanan publik, namun menjadi terancam karena ketidaksesuaian pembagian tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis dan penyesuaian dalam struktur organisasi supaya setiap pegawai memahami perannya dan dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa, terungkap bahwa kinerja Kaur Perencanaan belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan di Desa Sogo. Kepala Desa Sogo menyatakan bahwa, "Kami menyadari bahwa Kaur Perencanaan sering kali harus menerima pekerjaan tambahan yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lain. Ini bukan hanya karena kekosongan jabatan, melainkan saya percaya bahwa Kaur Perencanaan dengan anggota yang masih terbilang muda lebih memiliki kemampuan dibidang teknologi".

Sementara itu, perangkat desa lain Kasi Kesejahteraan menyampaikan bahwa "Kaur Perencanaan di Desa Sogo memang sering menerima tugas tambahan di luar tanggung jawabnya. Kekosongan jabatan Kasi Pelayanan menjadi penyebab utama beban kerja Kaur Perencanaan meningkat, sehingga kelelahan yang mempengaruhi

pelaksanaan tugas utamanya". Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara dengan perangkat desa lain yang mengungkapkan, "Kami semua ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun dengan pembagian tugas yang tidak sesuai, kami merasa kesulitan. Kami perlu dukungan dan pelatihan agar bisa menjalankan tugas kami dengan baik".

Berjalannya pelayanan publik yang baik akan menjadi citra positif bagi masyarakat karena kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat sekaligus memenuhi fungsi dasar dari pemerintah karena pemerintahan ada dan diadakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Pratama et al., 2024). Namun sejalan dengan pernyataan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi Kaur Perencanaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima di desa. Harapannya hasil penelitian ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Desa Sogo, serta dapat meningkatkan tanggung jawab aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Lokasi ini dipilih karena masih banyak masalah terkait tugas dan fungsi Kaur Perencanaan yang tidak sesuai dengan jabatannya. Hal ini menjadi perhatian utama karena Kaur Perencanaan yang seharusnya memiliki peran strategis dalam merencanakan dan mengelola pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu Desa Sogo menghadapi banyak tantangan yang sering kali muncul dalam pengelolaan pelayanan publik, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika hubungan antara perangkat desa.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain naratif. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Melalui desain naratif, peneliti dapat menyusun cerita atau narasi yang mencerminkan realitas yang dialami oleh subjek penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan pelayanan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data primer dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan memeriksa data dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: 1) Pengumpulan data, pada tahap ini data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2) Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan mengenai relevan atau tidaknya data dengan tujuan penelitian. 3) Display data, peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai permasalahan. 4) Penarikan kesimpulan, kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian (Miles & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Peran dan Tugas Kaur Perencanaan di Desa Sogo

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kaur Perencanaan berfungsi sebagai unsur staf sekretariat yang membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pemerintahan. Tanggung jawab Kaur Perencanaan antara lain yaitu menyusun rencana Pembangunan desa, mengelola data dan informasi, serta evaluasi program dan kegiatan desa. Oleh karena itu perannya menjadi sangat penting dalam menyokong fungsi perencanaan dan pengembangan di tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fatiya Diana Wulandari Putri et al., 2023). Namun dalam praktiknya Kaur Perencanaan di Desa Sogo sering diberi tugas tambahan di luar tanggung jawabnya, seperti melayani kebutuhan pembuatan Kartu Keluarga, KTP, akta kelahiran, dan pengarsipan aset desa. Meskipun menunjukkan fleksibilitas, penugasan ini dapat mempengaruhi fokus dan kualitas pelaksanaan tugas utama Kaur Perencanaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan implementasi di lapangan yang perlu segera di atasi. Beban kerja yang berlebihan dapat berdampak pada efektivitas perencanaan Pembangunan desa yang merupakan tugas utama Kaur Perencanaan. Oleh karena itu perlu penataan ulang pembagian tugas dan penempatan perangkat desa yang tepat sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi yang telah ditetapkan dalam Permendagri 84 tahun 2015. Dengan penataan yang baik, setiap perangkat desa akan memiliki kejelasan dalam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa berkontribusi secara maksimal demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi Kaur Perencanaan dalam Meningkatkan Pelayanan Prima

Penerapan strategi yang dilakukan oleh Kaur Perencanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima di Desa Sogo, antara lain: (1) Pengembangan kompetensi dalam teknologi informasi menjadi sangat penting dalam era digital saat ini. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya dapat mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi dan keandalan data yang dikelola oleh pemerintah desa. Dengan memanfaatkan teknologi, Desa Sogo dapat mengoptimalkan berbagai proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu dan relevan. Salah satu contoh konkret dari pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan platform media sosial seperti Instagram.

Melalui Instagram, Desa Sogo dapat membagikan berbagai informasi dan pembaruan terkait program-program desa secara langsung kepada masyarakat. Ini tidak hanya memudahkan akses informasi bagi warga, tetapi juga menciptakan interaksi yang lebih dinamis antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih terlibat dan mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan dan inisiatif yang sedang berlangsung di desa. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan warganya.

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa contoh postingan yang telah dibagikan oleh Desa Sogo, yang mencerminkan komitmen mereka dalam meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat melalui teknologi informasi:



Gambar 1. Platform Instagram Desa Sogo

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang berfokus pada perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Program pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perangkat desa agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kompetensi SDM, diharapkan para anggota perangkat desa dapat memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga berpotensi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena mereka akan merasakan langsung dampak positif dari pelayanan yang lebih baik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah desa mampu merespons kebutuhan mereka dengan efektif, partisipasi mereka dalam proses pembangunan akan meningkat. Hal ini menciptakan siklus positif di mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya menjadi lebih aktif, tetapi juga lebih konstruktif, sehingga mendorong terciptanya desa yang lebih maju dan berdaya saing.



Gambar 2. Pelaksanaan Bimtek

(3) Kolaborasi dengan perangkat desa lain. Dalam rangka peningkatan efisiensi kerja, Kaur Perencanaan dapat bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing anggota perangkat desa. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban kerja yang berlebihan pada Kaur Perencanaan, tetapi juga mempercepat penyelesaian berbagai tugas dan program yang sedang berjalan.

Selain itu adanya kolaborasi ini, potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi pertukaran ide dan solusi kreatif, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama antarperangkat desa menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan responsif.



Gambar 3. Rapat pelaksanaan program kerjasama

(4) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam pelayanan prima yaitu transparansi. Kaur Perencanaan dapat menyusun laporan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui musyawarah desa dan media komunikasi lainnya. Adapun contohnya yaitu pada postingan di Instagram Desa Sogo dan informasi yang disediakan di kantor desa yang dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan laporan dan informasi secara terbuka kepada masyarakat, sehingga partisipasi mereka dalam masyarakat desa dapat meningkat.



Gambar 4. Informasi APBDes 2022 di kantor Desa Sogo



Gambar 5. Postingan informasi APBDes 2023 di Instagram Desa Sogo

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kaur Perencanaan Desa Sogo dalam menyusun strategi yang sudah dirancang yaitu pertama, keterbatasan sumber daya. Minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang perencanaan dan pengelolaan publik, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan strategi yang telah dirancang. Menurut Afrizal et al. (2022), digitalisasi dalam pemerintahan desa merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi serta pelayanan publik di tingkat desa. Sakistia et al. (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa SDM menjadi kunci menghadapi era ekonomi digital yang tengah berlangsung saat ini. Namun kenyataannya masih banyak anggota desa yang masih banyak belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung program-program yang diusulkan, sehingga mengakibatkan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pelayanan. Selain itu, terbatasnya jumlah anggota desa yang dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan juga mengurangi kapasitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengoptimalkan potensi yang ada dan memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kapasitas SDM di tingkat desa. Oleh karena itu pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota desa menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan program-program yang di rencanakan.

Kedua, beban kerja yang beragam. Kaur Perencanaan sering kali diberi tugas tambahan di luar tanggung jawabnya. Tugas tambahan ini dapat berupa administrasi, pengorganisasian acara, atau kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan perencanaan. Hal ini berakibat fokus Kaur Perencanaan terhadap tugas utama mereka dalam menyusun dan melaksanakan strategi pelayanan menjadi terganggu. Beban kerja yang berlebihan ini tidak hanya mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan strategi, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun untuk jangka panjang, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas, sehingga penting untuk melakukan evaluasi dan pembagian ulang tugas supaya Kaur Perencanaan dapat lebih fokus pada peran strategis mereka masing-masing.

Ketiga, resistensi perubahan. Masyarakat dan perangkat desa lainnya kurang mendukung perubahan yang diterapkan oleh Kaur Perencanaan, karena perubahan

tersebut dianggap mengganggu kebiasaan yang sudah ada. Ketidakpastian mengenai manfaat dari perubahan yang diusulkan dapat menimbulkan ketakutan dan penolakan di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka dapat memahami dan merasakan manfaat dari perubahan yang diterapkan, sehingga dukungan terhadap strategi pelayanan dapat meningkat. Selain itu, komunikasi yang efektif dan transparan mengenai tujuan dan manfaat perubahan juga sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian di kalangan masyarakat.

PEMBAHASAN

Strategi yang diterapkan oleh Kaur Perencanaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima di Pemerintahan Desa Sogo merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola desa yang efektif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu pendekatan strategis yang digunakan adalah penerapan perencanaan partisipatif, di mana masyarakat secara aktif dilibatkan dalam musyawarah desa guna menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan (Putra, 2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi program kerja desa, tetapi juga mendorong rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil pembangunan (Abreu et al., 2021).

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan desa turut menjadi bagian dari strategi Kaur Perencanaan. Digitalisasi proses perencanaan melalui aplikasi e-Planning dan Sistem Informasi Desa (SID) memungkinkan transparansi yang lebih tinggi, efisiensi penyusunan dokumen, serta peningkatan akuntabilitas pelayanan publik (Kumar et al., 2014). Hal ini sejalan dengan gagasan tentang tata kelola desa berbasis teknologi digital dan ekologi hijau yang meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Lv & Shi, 2023).

Kaur Perencanaan juga mengembangkan model kolaboratif dalam penyusunan perencanaan dengan melibatkan lembaga desa lain seperti BPD, tokoh masyarakat, serta pihak swasta atau LSM. Pendekatan collaborative governance ini memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan memungkinkan inovasi dalam pelayanan publik (Zhang & Zhang, 2020). Dalam praktiknya, kolaborasi semacam ini terbukti mempercepat pencapaian pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Fortuito et al., 2016).

Lebih jauh, penerapan Village Expansion Model juga relevan sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan pelayanan di desa. Model ini menekankan pada keterpaduan antara aspek objektif (seperti ketersediaan infrastruktur), subjektif (kepuasan masyarakat), dan psikologis (motivasi aparatur) yang secara keseluruhan memperkuat tata kelola dan pelayanan (Hidayat et al., 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan desa dalam menyesuaikan perencanaan dengan karakteristik geografis dan sosiokultural lokal (Chen et al., 2021).

Strategi Kaur Perencanaan di Desa Sogo mencerminkan pendekatan yang holistik, adaptif, dan berbasis kolaborasi. Perencanaan yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat, teknologi digital, prinsip keberlanjutan, dan tata kelola kolaboratif akan mendorong pelayanan desa yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan praktik global dalam pengelolaan desa cerdas

(smart village) yang mengedepankan inovasi dan inklusivitas dalam pelayanan publik (Zhang & Zhang, 2020).

KESIMPULAN

Kaur Perencanaan di Desa Sogo memiliki peran penting dalam menyusun rencana pembangunan, mengelola data, dan melakukan evaluasi program, meskipun sering kali diberikan tugas tambahan di luar tanggung jawabnya. Adapun tugas Kaur Perencanaan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima, seperti pengembangan kompetensi teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia, kolaborasi dengan perangkat desa lain, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang beragam, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan. Solusi yang telah diterapkan yaitu, penambahan staf desa, pelatihan teknologi untuk perangkat desa, dan penyusunan SOP yang jelas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan mendukung Kaur Perencanaan dalam menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga berkontribusi pada pembangunan Desa Sogo yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, I., Mesias, F. J., & Ramajo, J. (2021). Design and validation of an index to measure development in rural areas through stakeholder participation. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.12568>
- Afrizal, Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (e-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1). <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174>
- Briansyah, M. P., & B, A. R. U. (2024). *Challenges in Community Participation for Village Governance Planning. Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1071>
- Chen, J., Wang, C., Dai, R., Xu, S., Shen, Y., & Ji, M. (2021). *Practical village planning strategy of different types of villages—A case study of 38 villages in Shapingba District, Chongqing. Land*, 10(11), 1143. <https://doi.org/10.3390/land10111143>
- Ediwijoyo, S. P., Waluyo, A., Nasrullah, H., Yuliyanto, W., & Triana, E. S. (2023). Menciptakan Pelayanan Prima di Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam Kebumen. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1137>
- Fatiya Diana Wulandari Putri, Angella Yunita Azarah, & Rahmasari Dwi Agustina. (2023). Peran Perangkat Desa dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Memberikan Pelayanan Publik di Desa Jubung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 230–247. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2436>
- Fitriyah, N. Q., Sulistyo, H. W., & Arifin, Z. (2023). Peningkatan Kinerja Staf Desa Sumbersalak Melalui Pelatihan Dasar Microsoft Word. *Journal Of Humanities Community Empowerment*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.32528/jhce.v1i1.424>
- Fortuito, A. M., Haque, F., Shabnam, L., Bhuiyan, M., Krishna, A., & Withana, C. (2016). *Enhancing public service delivery through organisational modeling*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1606.03548>

- Gazalin, J., Asiri, L., Sujana, I. W., Irfan Saputra, L. O., Reni, A., & Rahman, A. (2021). Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. *Journal of Training and Community Service Adpertisi*, 1(2). <http://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JTCSA/submissions>
- Hidayat, R., Nurdin, N., Madjid, U., & Tahir, M. I. (2024). *The Village Expansion Model for Village Governance and Public Service Improvement in North Lombok Regency. International Journal of Research in Business and Social Science*, 13(2), 253–264. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i2.3246>
- Kumar, P., Kumar, D., & Kumar, N. (2014). *ICT in Local Self Governance: A Study of Rural India*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1401.0591>
- Lv, L., & Shi, D. (2023). *Innovative Development and Practice of Digital Rural Governance Model Based on Green Ecology. Sustainability*, 15(4), 2955. <https://doi.org/10.3390/su15042955>
- Magfirona, A., Fitrianingrum, R., Rahmawati, F., Hidayati, N., Sunarjono, S., Listyawan, A. B., & Handayani, N. K. (2024). Edukasi Keselamatan Lalu Lintas Di Kalangan Emak-Emak RW. 02 Desa Sogo Kabupaten Blora. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.52561/abma.v5i1.311>
- Mardatillah, A., Bisnis, A., & Islam Riau, U. (2021). Program Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bumdes untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Desa Koto Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi. *Canang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 41–45. <http://canang.pelantarpress.co.id/41http://canang.pelantarpress.co.idARTICLEOPENACCESS>
- Meidyanto, D., Saputra, R., & Nurrahman, A. (2021). Keefektifan Analisis Jabatan Dalam Penempatan Pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(2), 99–116. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i2.2004>
- Pratama, D. A., Rumesten, R. I., & Flambonita, S. (2024). Pelaksanaan Pelayanan Publik Akibat Kepala Daerah Berhalangan Tetap. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.34304>
- Putra, F. (2023). *Village Governance and Public Participation in Indonesia. Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(2), 55–64. <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Putri, F. D. W., Azahra, A. Y., & Agustina, R. D. (2023). Peran Perangkat Desa dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Memberikan Pelayanan Publik di Desa Jubung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 230–247. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2436>
- Sakistia, F., Junaedi, D., Sri, R., Iai, A., Laa, N., & Bogor, R. (2022). Ekosistem SDM dan Inovasi Ekonomi Digital di Indonesia. In *Sci-Tech Journal* (Vol. 2, Issue 1). Setiawati, R., & Tri Aji, P. S. (2020). Implementasi Sapta Pesona Sebagai Upaya Dalam Memberikan Pelayanan Prima Pada Wisatawan Di Desa Wisata Pentigsari. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.98>

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA.
- Zaeniah, Muttaqin, Z., Delsi Samsumar, L., Budiamin, M., & Yusuf, M. (2022). Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Bagi Perangkat Desa Pemepek. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1453–1458. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal>
- Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). *How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. Sustainability*, 12(24), 10510. <https://doi.org/10.3390/su122410510>
- Zulfiqar, M., & Rizqiansyah, A. (2017). Hubungan Antara Beban Kerja Fisik dan Beban Kerja Mental Berbasis Ergonomi Terhadap Tingkat Kejenuhan Kerja Pada Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol. *Jurnal Sains Psikologi*, 6, 37–42. <https://doi.org/10.17977/um023v6i12017p37-42>